KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kinerja rendah, ubah strategi pengawalan
Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2014
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

LEGISLASI

Kinerja Rendah, Ubah Strategi Pengawalan

JAKARTA, KOMPAS – Rendahnya capaian Dewan Perwakilan Rakyat di bidang legislasi membuat masyarakat perlu mengubah strategi pengawalan terhadap pembahasan rancangan undang-undang. Masyarakat perlu lebih aktif memberi data berupa draf dan naskah akademik kepada anggota DPR.

Demikian pemikiran yang muncul dalam diskusi "Mendorong Agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pro Perempuan", Rabu (20/8), di Jakarta.

"DPR perlu lebih selektif memasukkan sebuah rancangan undang-undang (RUU) ke Prolegnas. Selama ini, DPR cenderung banyak mendaftarkan RUU, namun hanya sedikit yang dibahas sampai akhirnya disahkan," kata peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Fajri Nursyamsi.

Menurut Fajri, ada 247 RUU yang masuk Prolegnas periode 2009-2014, yang kemudian ditambah lagi dengan 4 RUU. Namun, hingga Juli 2014, baru 92 RUU yang disahkan menjadi UU. Ini berarti setiap tahun hanya 20 UU yang disahkan.

Ia menambahkan, ada beberapa sebab jumlah RUU yang disahkan menjadi UU selalu di bawah target. Pertama, karena pengajuan RUU sering kali tidak disertai dengan draf dan naskah akademik. Kedua, munculnya sejumlah hambatan saat pembahasan RUU, baik yang bersifat substansi maupun kendala teknis. Ketiga, minimnya pemantauan dan pengawalan masyarakat.

Guna mengatasi hal itu, masyarakat mesti mengubah strategi saat mendorong agar sebuah RUU dapat masuk Prolegnas. "Jika sebelumnya mendorong lewat aksi, ke depan mesti diubah dengan memberi data kepada anggota DPR," kata Fajri.

Selain bermaksud mengingatkan, pemberian data itu juga akan membuat anggota DPR mendapat masukan hingga usulan dan pendapat mereka menjadi lebih tajam dalam sidang.

"Masyarakat perlu ingat, anggota DPR dipilih bukan sebagai pembuat draf, melainkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat," ujarnya. Dia menyatakan, saat ini di DPR hanya ada 40 pembuat draf RUU.

Pro perempuan

Direktur LBH APIK, Jakarta, Ratna Batara Munti berharap, sebelum masa kerjanya berakhir, DPR 2009-2014 dapat mengesahkan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) serta RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

RUU PPRT sudah masuk ke Badan Legislasi DPR sejak 10 tahun lalu. Perdebatan utama di RUU yang terakhir dibahas pada Juni 2013 ini terkait dengan standar pengupahan. "Meski sudah masuk ke Badan Legislasi DPR, kami tidak pernah tahu mana yang jadi prioritas DPR untuk dibahas," kata Ratna.

Sementara itu, RUU Penyandang Disabilitas masih diusahakan masuk Prolegnas. "Mesti ada perubahan cara pandang dari perspektif karitatif ke individu. RUU itu juga harus rinci," ucap Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Maulani Rotinsulu terkait RUU Penyandang Disabilitas. (A12)